



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

ANALISA KOMPARATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DAN PROGRAM INISIATIF MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dumanita Tamba¹, Ismi Sujastika², Wahyu Pratama Tamba^{3*}

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Nusa Cendana

²Program Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

³Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia

Corresponding : wahyu.pratama32@ui.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 2 Desember 2024

Revised date: 18 Januari 2025

Accepted date: 21 Januari 2025

This research discusses the comparison and analysis between empowerment programs initiated by the government and those undertaken by the community, identifying the strengths and weaknesses of each in the context of social welfare. By exploring the effectiveness of both types of programs, this study aims to provide deeper insights into more effective empowerment strategies for improving community welfare. The research employs a qualitative approach using literature review methods by examining previous studies and other relevant sources. The next step involves comprehensive data analysis to extract meaning from the collected data and abstract it into subtopics to address the research problem formulation. The findings indicate that government programs have advantages in policy and budget support but often face challenges due to bureaucratization and lack of flexibility. Meanwhile, community initiative programs demonstrate strengths in adaptability and high participation, but face constraints related to limited resources and reach. The impact of this research reveals that both programs contribute knowledge about social welfare to the community. In conclusion, both government-initiated and community-initiated empowerment programs equally support the empowerment needed to achieve comprehensive social welfare for society.

Keywords: empowerment; social welfare; participation

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas perbandingan dan analisis antara program pemberdayaan yang diprakarsai oleh pemerintah dan program pemberdayaan yang diprakarsai oleh masyarakat, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing program dalam konteks kesejahteraan sosial. Dengan mengeksplorasi efektivitas kedua jenis program tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang relevan. Langkah selanjutnya adalah analisis data yang komprehensif untuk mengekstrak makna dari data yang terkumpul dan menyarikannya ke dalam subtopik-subtopik untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah memiliki keunggulan dalam hal dukungan kebijakan dan anggaran, namun seringkali menghadapi tantangan karena birokratisasi dan kurangnya fleksibilitas. Sementara itu, program inisiatif masyarakat menunjukkan kekuatan dalam hal kemampuan beradaptasi dan partisipasi yang tinggi, namun menghadapi kendala terkait sumber daya dan jangkauan yang terbatas. Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua program tersebut memberikan kontribusi pengetahuan tentang kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Kesimpulannya, baik program pemberdayaan yang diprakarsai oleh pemerintah maupun yang diprakarsai oleh masyarakat sama-sama mendukung pemberdayaan yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang komprehensif bagi masyarakat.

Kata Kunci: pemberdayaan; kesejahteraan sosial; partisipasi

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan elemen krusial dan kebutuhan utama kehidupan individu dalam masyarakat. sebagai kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial harus terpenuhi secara layak, agar kehidupan yang dimiliki individu menjadi baik, sejahtera, dan bermartabat. Ditinjau dari prinsip pemenuhan kebutuhan hidup, kesejahteraan sosial merupakan alasan terpenuhinya hak-hak dasar seseorang menjadi parameter hidup sejahtera di dalam masyarakat. Hak-hak tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, serta perlindungan sosial. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Fridlander (1980) dalam Fahrudin (2012), yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terdiri dari institusi dan layanan sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok masyarakat dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai serta menciptakan hubungan personal dan sosial yang memfasilitasi mereka dalam pengembangan kemampuan dan kesejahteraan penuh sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selanjutnya menurut Midgley (2005), kesejahteraan sosial adalah kondisi atau keadaan di mana berbagai masalah sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Sementara itu, menurut Dolgoff dan Feldstein (2013), kesejahteraan sosial adalah sistem program, tunjangan, dan layanan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang penting untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya, secara lebih khusus, kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi sosial manusia (Dolgoff & Feldstein, 2013). Ketiga definisi itu menekankan adanya intervensi dari pemberi layanan kepada masyarakat sasaran sebagai klien program pembangunan kesejahteraan sosial, layanan dimaksud dapat beranekaragam sesuai kebutuhan masyarakat, yakni dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Pandangan Adi (2018) memberikan khasanah pengetahuan dalam bidang kesejahteraan sosial, ia mengungkapkan ada empat cara berbeda untuk melihat dan memahami kesejahteraan sosial. Keempat perspektif itu antara lain, kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi; berkaitan dengan pembangunan sectoral; sebagai sistem layanan; dan sebagai disiplin ilmu. Keempat nya tidak berdiri sendiri, namun memiliki kaitan satu sama lainnya. Perspektif kesejahteraan sosial memberikan pandangan baru yang melihat kesejahteraan tidak saja dari aspek dan fisik, di mana memasukkan unsur spiritual, mental, dan sosial.

Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan sosial digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia akan melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan meningkatkan kehidupan bangsa. Bidang kesejahteraan menjadi fokus pembangunan nasional, dengan setiap kemajuan dalam bidang kesejahteraan sosial berkorelasi dengan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kemudian Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengadaptasi amanat tersebut. Pasal 4 undang-undang tersebut secara jelas menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Sementara itu, berbagai kajian mengungkapkan, pembangunan ekonomi berfokus pada beberapa tujuan yang berkelanjutan di antaranya, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial (Long & Ji, 2019; Laukkanen and Tura, 2020; Faraji et al, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tiga bentuk lainnya yakni jaminan sosial, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6, pemberdayaan sosial mencakup semua upaya untuk membuat warga negara yang mengalami masalah sosial memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika bicara

tentang kebutuhan dasar manusia, Maslow (dalam Muazaroh, 2019) melalui teori kebutuhannya mengemukakan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan penggerak motivasi manusia secara menyeluruh. Dalam teori ini dikemukakan bahwa berdasarkan tingkatannya terdapat lima kebutuhan dasar manusia yaitu, kebutuhan fisik, rasa aman, kepemilikan dan cinta, kebutuhan untuk dihargai dan aktualisasi diri.

Dari konsep kesejahteraan sosial yang secara umum menyoal kepada pemenuhan atas kebutuhan dasar manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan hidup yang layak, Sejahtera, dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagaimana yang dikemukakan Maslow dalam teori kebutuhannya. Setelah kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka manusia sebagai individu maupun bagian dari akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. Misalnya, seseorang yang memiliki akses pendidikan yang baik, maka akan lebih memungkinkan untuk mengembangkan keterampilannya sehingga dapat berpartisipasi meningkatkan kualitas hidupnya, maupun orang-orang di sekitarnya (Narayan, 2002).

Pemberdayaan, menurut Shardlow (1998) dalam (Adi, 2013), adalah upaya seseorang, kelompok, atau komunitas untuk mengambil alih kendali atas kehidupan mereka sendiri dan menciptakan masa depan yang mereka inginkan. Dalam pandangan yang berbeda Steward (1998) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah kegiatan yang dapat mengaktualisasikan seluruh potensi terbaik orang yang sedang diberdayakan. Sementara itu Payne (1997) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membantu pelanggan memiliki otoritas untuk membuat pilihan terbaik dalam hidup mereka melalui peningkatan kapasitas dan kepercayaan dirinya.

Amanat UUD 1945, UU Kesejahteraan Sosial, kajian pembangunan, dan pendapat para ahli sebelumnya menyiratkan tentang betapa pentingnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, sehingga diperlukan suatu upaya pemberdayaan. Pada pokoknya, pemberdayaan memberikan bantuan bagi klien sasaran untuk dapat mengubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik melalui peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, dan sumberdaya. Penyelenggaraan program

pemberdayaan dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak antara lain, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi sosial, dan masyarakat (Sudarsana, 2018).

Istilah ‘pemberdayaan’ berasal dari kata *empowerment* yang secara terminologi bermakna sebagai upaya pemberian kemampuan atau kekuatan (*power*) kepada pihak sasaran yang dianggap kondisinya lemah atau secara politis dan structural kondisinya dilemahkan (Suaib, 2023). Suaib (2023), menjelaskan adanya tiga kata kunci (*keyword*) dalam konsep pemberdayaan, diantaranya, adanya peran serta ataupun partisipasi, adanya transparansi kemudian demokrasi. Pemberdayaan menekankan syarat unsur peran serta atau partisipasi yang setara diantara pemerintah, masyarakat dan swasta. Dengan adanya partisipasi secara penuh di dalam kondisi suasana demokratis untuk itu diharapkan terjadinya distribusi alokasi sumber daya ekonomi dan pendistribusian manfaat sehingga tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari lapisan paling bawah. Penjelasan tersebut sejalan dengan studi Guo et al (2024) yang mengungkapkan, bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk membangun mekanisme perlindungan sosial dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat, di mana mayoritas kebijakan kesejahteraan cenderung melindungi kelas ekonomi bawah.

Unsur kekuasaan dan kelompok lemah membentuk konsep pemberdayaan, menurut Ife dalam Suaib (2023). Kekuasaan berarti lebih dari hanya kekuasaan politik; itu juga berarti menguasai klien terhadap beberapa kemampuan, antara lain: Menurut Ife dalam Suaib (2023) konsep pemberdayaan memuat dua unsur penting, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Makna kekuasaan bukan hanya menyangkut kekuasaan dalam politik, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien terhadap beberapa hal kemampuan diantaranya: kemampuan dalam membuat keputusan; mendefinisikan dan menentukan kebutuhan sesuai dengan pendapat dan keinginannya; mengekspresikan dan menyampaikan gagasannya, kemampuan untuk menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga sosial misalnya pendidikan dan kesehatan; memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan

kemasyarakatan; kemampuan untuk menggunakan dan mengawasi proses produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.

Terkait program pemberdayaan, studi Tamba (2015) mengenai program pemberdayaan masyarakat bidang perumahan dan penanggulangan permukiman kumuh, yang diselenggarakan pemerintah daerah di Jakarta menyimpulkan urgensi peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan kampung deret dan keberlanjutan lingkungan kampung deret setelah program selesai dilaksanakan. Penelitian Reskiaddin et. al. (2020) menemukan bahwa administrasi birokrasi adalah salah satu tantangan dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular di Sleman, DI. Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh waktu yang lama yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan masyarakat selama proses perizinan dari tingkat atas ke tingkat paling bawah.

Hasil penelitian mengenai kendala pendanaan diungkapkan dalam temuan studi penelitian Santoso (2022) mengungkapkan mengenai kendala pendanaan saat penyelenggaraan program pemberdayaan Desa Wisata oleh Pemerintah Kota Semarang. Studi Mirani (2019) menemukan beberapa masalah saat menerapkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Di antara masalah tersebut adalah keterbatasan masyarakat dalam hal keterampilan dan pengetahuan, serta kekurangan bantuan fasilitas dari pemerintah daerah.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat, diketahui memiliki efek yang berbeda. Akan tetapi dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada satupun penelitian yang mengkaji mengenai kelebihan dan kekurangan dari program pemerintah dan program yang diinisiasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini berfokus dengan membandingkan (komparasi) dan menganalisis program pemberdayaan pemerintah dan program pemberdayaan inisiatif masyarakat dalam kajian kesejahteraan sosial dengan melihat

kekuatan dan kelemahan dari masing-masing program yang diinisiasi oleh pemerintah dan juga masyarakat. Diharapkan studi ini tidak saja berkontribusi dalam pengembangan keilmuan kesejahteraan sosial dan pemerintahan, namun dapat jauh lebih bermanfaat bagi pelaksana program pemberdayaan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menginisiasi program pemberdayaan termasuk kalangan masyarakat sipil/*Non-Governmental Organization* (NGO).

METODE PENELITIAN

Untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena, studi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana program pemberdayaan merupakan fokus fenomena pada penelitian ini. Fokus penelitian tersebut kemudian didalami secara komprehensif, hal ini sejalan dengan pandangan Rasyid (2015) bahwa fokus penelitian kualitatif, yaitu, mempelajari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian dengan sangat mendalam, menggambarkan fenomena dari berbagai aspek dan sudut pandang hingga akhirnya mampu mengkonstruksi makna dari kedalaman menjelaskan fenomena dimaksud.

Jenis penelitian menggunakan kajian pustaka dengan menghimpun dan mempelajari fenomena permasalahan dari berbagai sumber referensi terkait, diantaranya jurnal penelitian terdahulu, referensi buku, dokumen lembaga pemerintah, dan lainnya. Metode kajian pustaka menurut Zed (2004) adalah suatu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara dan teknik pengumpulan melalui pencarian data kepustakaan, membaca, mencatat hingga mengolah bahan penelitian. Upaya memperoleh data dari sumber-sumber itu melalui *tools* pencarian pada *google scholars*, dan perpustakaan digital (*digital library*) Universitas Indonesia utamanya untuk mengakses artikel penelitian dari berbagai jurnal internasional bereputasi. Setelah memperoleh dan membangun makna atas berbagai data fenomena yang ada, kemudian dianalisa secara kualitatif. Teknik analisa data tersebut sejalan dengan pendapat Creswell (2014), bahwa proses analisis data adalah upaya untuk memahami data, baik itu gambar maupun teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan dan Kelemahan Program Pemberdayaan Pemerintah

Program pemberdayaan pemerintah pada dasarnya memiliki peran dan kontribusi di dalam pengembangan masyarakat. Namun demikian, sebagai analisa komparatif penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa saja kekuatan dan kelemahan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga dapat melihat letak perbedaannya dengan program pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat. Demikian juga telaah kelemahan setiap program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah dan juga masyarakat, berguna tidak hanya untuk kepentingan evaluasi program yang sudah ada, namun juga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program dimasa mendatang agar lebih baik.

Beberapa kekuatan tersebut antara lain, pertama, pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan, penugasan personil, alokasi anggaran yang mendukung program pemberdayaan. Misalnya, pemerintah daerah membentuk regulasi meliputi Perda, Pergub, Perbup, maupun Perwali sebagai landasan penyelenggaraan program yang mengatur alokasi anggaran, personil, mekanisme implementasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Kedua, pemerintah dapat bersinergi dengan berbagai lembaga yaitu sektor birokrasi dan swasta. Koordinasi dengan berbagai pihak dimaksudkan agar penanganan masalah serta solusi melalui program pemberdayaan lebih komprehensif dengan dukungan data, pandangan, masukan berbagai pihak.

Beberapa hal kekuatan tersebut tergambar di dalam studi penelitian Wirantari (2024) yang berfokus pada upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan pariwisata berbasis minat khusus melalui program desa wisata di Desa Tenganan dan Desa Suana. Program tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan desa wisata ekologi yang dirancang oleh dan untuk masyarakat, di mana keuntungan yang diperoleh dialokasikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat dan upaya konservasi desa.

Berdasarkan temuan studi tersebut, beberapa hal kekuatan dimaksud antara lain: pertama, adanya struktur organisasi Pemerintah Desa Tenganan dan

Desa Suana yang efektif dan memadai dalam pembagian tugas sehingga upaya pengembangan Desa Wisata dapat berjalan dengan baik. Kedua, Pemerintah Desa Tenganan dan Desa Suana memiliki sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, pengembangan Desa Wisata didukung dengan dasar hukum formal dan kuat, yaitu peraturan bupati dan surat keputusan bupati dalam penetapan desa wisata. Keempat, adanya komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk sinergi bekerja sama dalam pengembangan Desa Wisata dan pengelolaan potensi wisata di desa. Kelima, Adanya dukungan teknologi dan informasi berupa Desa Tenganan dan Desa Suanan melalui penggunaan media sosial dalam mempromosikan desa wisata

Selanjutnya studi Almasri & Deswimar (2014) mengenai program pemberdayaan masyarakat desa di Riau menunjukkan urgensi program untuk mengatasi persoalan kemiskinan pada masyarakat desa. Program tersebut merupakan implementasi Keputusan Presiden nomor 124 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, yang diperkuat oleh Keputusan Presiden nomor 8 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau, merupakan dasar dari program yang dimaksud. Setiap desa atau kelurahan di Provinsi Riau mengikuti program pemberdayaan masyarakat desa yang berlangsung selama lima tahun, di mana tiga tahun awal sebagai masa pembinaan dan dua tahun berikutnya sebagai masa transisi. Fasilitator program dan Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota akan membina dan memantau program secara berkala. Berdasarkan hasil studi itu, dapat dinilai bahwa program pemberdayaan masyarakat desa didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, hal itu penting untuk dukungan sumberdaya anggaran dan personil. Dijelaskan dalam penelitian bahwa selain fasilitator program, juga melibatkan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim yang beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Ketiga, program yang dijalankan pemerintah bersifat resmi berlandaskan regulasi yang ada, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sasaran atau penerima manfaat program (*beneficiaries*). Kepercayaan

antara pemerintah dan masyarakat akan memudahkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Ini sejalan dengan hasil studi Tamba (2015), yang mana masyarakat di kawasan kumuh Jakarta bersedia mengikuti program Kampung Deret dan berpartisipasi di dalam persiapan pelaksanaan program.

Keempat, sumberdaya yang melekat dalam program pemerintah meliputi dukungan anggaran, personil dan kewenangan berkoordinasi dengan jajaran Pemerintahan di bawahnya. Misalnya, program pemerintah provinsi melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga tingkat kelurahan/ desa, kemudian sumber anggaran telah dialokasikan di dalam APBD provinsi ataupun APBD kabupaten/kota.

Sementara itu, juga terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan di dalam program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah, antara lain, pertama, birokratisasi pemerintah cenderung menjadi momok dalam efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan, karena hirarki yang harus ditempuh di dalam pemerintahan. Akibatnya, kecepatan program terhambat, tidak adaptif dengan kebutuhan dan situasi kehidupan masyarakat yang berubah sedemikian cepatnya. Sebagaimana yang terjadi pada program promosi kesehatan di Sleman, DI. Yogyakarta, Reskiaddin et al (2020) menjelaskan persoalan administrasi birokrasi yang berjenjang dan memakan waktu yang lama.

Kedua, program dijalankan berpusat pada arahan pemerintah dari level atas untuk kemudian diteruskan ke jajaran dibawah hingga ke pihak pelaksana program, lebih dikenal dengan istilah top-down. Hal ini berakibat kepada minimnya ruang yang memadai bagi mereka untuk memberikan respon masukan disaat perencanaan dan pelaksanaan program.

Ketiga, kekakuan program karena setiap hal yang berkenaan dengan program meliputi anggaran, personil, tata cara pada umumnya telah diatur di dalam ketentuan regulasi yang ada. Dengan kata lain, tidak lentur/tidak fleksibelnya pelaksanaan program karena harus taat merujuk pada landasan regulasi, penggunaan anggaran, dan pelibatan masyarakat. Akibatnya, program yang dilaksanakan cenderung

minim inovasi dan pendampingan kepada masyarakat penerima program (*beneficiaries*).

Keempat, potensi serapan anggaran program lebih besar terhadap pembiayaan program dan personil dibandingkan untuk kebutuhan masyarakat sasaran. Prinsip penggunaan dana pemerintah untuk berbagai kebutuhan pada dasarnya adalah penyerapan anggaran. Prinsip tersebut bisa dilihat pada aturan pemanfaatan dana, laporan pelaksanaan serapan dan capaian keluaran Dana Desa yang menjadi indikator *monitoring* evaluasi oleh Kementerian Keuangan, diatur dalam pasal 45 ayat (2) huruf b Permenkeu nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Ketersediaan dana menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan terlaksananya program dengan baik dan terukur. Namun studi Santoso (2022) menunjukkan kondisi ketersediaan dana yang menjadi kendala penyelenggaraan program pemberdayaan desa wisata di Kota Semarang. Sama halnya dengan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat yang menghadapi kendala minimnya bantuan fasilitas dari pemerintah daerah setempat, yang pada akhirnya program tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum dilaksanakan Mirani (2019).

Hasil penelitian mengenai kendala pendanaan diungkapkan dalam studi penelitian Santoso (2022) mengungkapkan mengenai kendala pendanaan saat penyelenggaraan program pemberdayaan Desa Wisata oleh Pemerintah Kota Semarang. Penelitian Mirani (2019) menemukan masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, diantaranya, rendahnya dukungan fasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan ketiadaan penyuluhan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan program, dan kondisi keterbatasan masyarakat dalam aspek keterampilan dan pengetahuan.

Kelima, program pemerintah melibatkan masyarakat pada seluruh tahapan program diantaranya perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program. Akibatnya program tidak berdasarkan kebutuhan prioritas dan evaluasi program tidak berbasis pada kondisi faktual yang

dialami masyarakat atau yang dibutuhkan di lapangan.

Partisipasi secara konseptual menurut Ife (2008) dalam Tamba (2015) terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya partisipasi antara lain: adanya isu atau aktivitas yang dianggap penting oleh masyarakat, aksi yang dilakukan membawa perubahan, adanya penghargaan yang diberikan terhadap berbagai bentuk partisipasi, adanya kemampuan dan dukungan berpartisipasi serta kondisi suatu struktur dan juga prosesnya yang tidak mengucilkan. Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program pemberdayaan bisa muncul apabila terdapat setidaknya salah satu atau beberapa faktor secara simultan. Selanjutnya tiga bentuk tahap partisipasi masyarakat yaitu: keterlibatan di dalam proses merencanakan dan menentukan arah kebijakan, keterlibatan memikul beban tanggungjawab dalam implementasi program, keterlibatan di dalam menikmati manfaat program. Pelaksanaan program Kampung Deret dalam upaya penataan permukiman kumuh di Jakarta misalnya, partisipasi masyarakat tidak mengakomodir untuk seluruh tahapan, dan tampak dominan pada saat pelaksanaan pembangunan rumah kampung deret dan setelahnya (Tamba, 2015).

Terakhir, studi penelitian Wirantari (2024) tentang upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan pariwisata di desa juga menyoroti berbagai kendala yang menjadi kelemahan program pemerintah. Beberapa hal kelemahan dimaksud antara lain, pertama, belum adanya anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan desa khusus wisata, ini menggambarkan kurangnya perhatian untuk mengembangkan desa khusus wisata terutama dukungan anggaran. Kedua, minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat di desa kawasan wisata, meliputi pembangunan sarana, lahan parkir, dan kios penjualan cinderamata khas desa wisata, serta sikap masyarakat yang tidak berani mengambil resiko untuk mengembangkan potensi wisata baru.

Permasalahan tersebut semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat, namun anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk kepentingan pengembangan desa wisata masih terbatas. Dilain pihak, masyarakat desa wisata juga belum mampu secara mandiri untuk membangun

sarana prasarana yang dibutuhkan karena keterbatasan anggaran dan modal.

Kekuatan dan Kelemahan Program Pemberdayaan Inisiatif Masyarakat

Beberapa hal kekuatan dari program pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat antara lain: pertama, program berangkat pada masalah dan kebutuhannya sendiri, sehingga mereka berupaya untuk menghadirkan program agar mereka mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, besarnya antusiasnya masyarakat untuk terlibat karena program berasal dari inisiatif warga tentu melibatkan warga secara langsung diberbagai tahap sejak perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi.

Kedua, rasa memiliki terhadap program. Sejak sebelum program diselenggarakan, mereka mengawalnya sejak perencanaan hingga tahap akhir. Di dalam penyelenggaraannya warga bersama-sama menjaga program agar berjalan dengan baik, mengatasi kendala yang ada dan melakukan evaluasi dengan melibatkan warga secara langsung, bahkan warga termotivasi untuk keberlanjutan program saat masalah belum tuntas atau sebaliknya meningkatkan performa layanan program untuk kedepannya. Ketiga, program inisiasi warga lebih adaptif dan fleksibel terutama untuk merespon masalah dan kebutuhannya, serta menyesuaikan dengan situasi yang cenderung dinamis. Perubahan-perubahan berikut bagaimana merespon perubahan yang ada tersebut akan dibahas bersama oleh warga sendiri.

Keempat, karakter kuat program inisiasi warga ditandai dengan inovasi dalam pelaksanaan program dan membuka ruang kreativitas warga untuk berpartisipasi menghadirkan solusi. Artinya, program pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh dan bagi segilintir orang warga namun memberikan ruang yang cukup luas untuk warga mempersembahkan buah pikir yang inovatif dan kreatif.

Program yang datangnya dari inisiatif masyarakat bisa dilihat dari program pemberdayaan masyarakat sipil *Save the Children* dalam program perlindungan anak dan penanganan masalah kemiskinan di Sumatera Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan program dengan pendekatan monitoring dan remediasi bagi pekerja

anak, disebut dengan *Child Labour Monitoring and Remediation System*. Tujuannya untuk memastikan berlangsungnya koordinasi pemantauan secara cepat dan tepat agar pekerja anak lebih merasa aman dan sejahtera. Bentuk program yang dijalankan seperti penyediaan akses belajar jarak jauh, membentuk komunitas membaca, dan mendampingi korban anak atas kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan seksual.

Selain itu, pelaksanaan program *Family First* yang fokusnya untuk mengubah pola pikir pengasuhan anak berbasis lembaga panti menjadi pengasuhan berbasis keluarga. Program tersebut mengharuskan adanya interaksi dengan anak dan pihak keluarga untuk mencegah terpisahnya anak-anak dari keluarganya (Wimartha et al, 2023; Gunawan et al, 2021). Selanjutnya, komunitas *Save Street Child* Malang membantu anak jalanan dengan mengadakan acara belajar bersama, menyediakan 1001 paket susu, mentoring kakak asuh, pertemuan dengan orang tua anak jalanan, dan mendorong mereka untuk kembali bersekolah (Wardana, 2017).

Program inisiatif masyarakat bukan tanpa kekurangan di dalam pelaksanaannya, yang mana pada umumnya terdapat beberapa kelemahan program yang diinisiasi masyarakat, diantaranya: pertama, minimnya beragam sumberdaya meliputi anggaran, sumberdaya ahli, dan pengalaman. Hal ini berdampak pada potensi terhambat atau bahkan terhentinya program sehingga penanganan masalah dan kebutuhan kelompok sasaran tidak terwujud. Anggaran cenderung bersumber dari swadaya warga, atau kelompok penggerak personil berasal dari warga sendiri yang minim pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat/ pelaksanaan program.

Kedua, jangkauan sasaran yang terbatas. Minimnya anggaran menjadi penyebab utama sehingga sasaran pemberdayaan terbatas pada area atau kelompok sasaran tertentu. Atas kondisi itu, jangkauan sebatas pada ruang lingkup warga sendiri dan tidak mampu untuk membangun jaringan diluarnya. Ketiga, program tidak didukung dengan perencanaan yang matang, karena hanya berlandaskan pada masalah dan kebutuhan sesuai pandangan sendiri. Tahapan perencanaan menjadi penting dan krusial, sebagai ruang dan kesempatan untuk mendapatkan masukan berbagai pihak di luar warga, berkoordinasi dengan pihak eksternal

(pemerintah, swasta, sponsorship). Semakin banyak masukan, tentu akan semakin mematangkan perencanaan, baik itu substantif, teknis operasional termasuk alokasi kebutuhan anggaran. Keempat, minimnya dukungan eksternal, yang potensial memberikan bantuan dalam banyak hal meliputi fasilitasi pelatihan personil dan sponsor pendanaan atau lainnya. Secara esensi, dukungan eksternal misalnya dari pemerintah atau sponsor dibutuhkan dalam program yang diinisiasi warga. Utamanya, fasilitasi anggaran dan peningkatan kapasitas untuk penyelenggaraan dan keberlanjutan program pemberdayaan.

Faktor Keberhasilan Program Pemberdayaan Pemerintah dan Inisiasi Masyarakat

Keberhasilan program pemberdayaan, baik itu program yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun program yang diinisiasi oleh masyarakat ditandai dengan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat penerima program (*beneficiaries*). Keberhasilan tersebut tentunya didukung oleh beberapa faktor, yang datangnya dari internal penyelenggara dan juga dari pihak diluar penyelenggara program. Beberapa faktor yang dinilai berkontribusi mewujudkan keberhasilan diantaranya: keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program, dimulai dari tahap perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam program menjadi esensi pemaknaan pemberdayaan, sebagaimana gagasan Ife (2008) yang telah dijelaskan sebelumnya. Partisipasi masyarakat tidak datang secara alami, namun membutuhkan pendorong dan juga kalisator dalam prosesnya. Masyarakat harus menilai suatu masalah yang menjadi fokus program pemberdayaan sebagai hal yang penting untuk diatasi, kemudian meyakini aksi yang dilakukan aktor pihak pemberdayaan akan membawa perubahan. Selain itu, validasi atau reward kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program juga tidak bisa diabaikan, karena hal itu penting dalam menjaga semangat dan konsistensi masyarakat dalam partisipasi program. Berikutnya, masyarakat mendapatkan dukungan dari pelaksana program dan terakhir bagaimana merangkul masyarakat sasaran program sejak awal agar mereka merasa memiliki terhadap program dan tidak mengalami pengucilan.

Kedua, dukungan sumber dana menjadi sangat penting, karena apabila dana terbatas ataupun pengalokasiannya terhambat oleh karena administrasi birokrasi secara langsung menghambat kelangsungan program. Demikian juga yang ketiga, pentingnya koordinasi dan kerjasama dengan banyak pihak, artinya memberikan ruang dan membuka diri secara luas sehingga dapat bekerjasama dengan lintas sektor seperti pemerintah, kelompok masyarakat, komunitas, dan masyarakat sipil/*Non-Governmental Organization* (NGO).

Keempat, dukungan sumber daya personil, faktor ini yang memastikan pelaksanaan program di lapangan, sehingga diperlukan personil yang terlatih dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kelima, selain didukung personil pelaksana program yang terlatih, juga penting untuk adanya pelatihan bagi masyarakat penerima program secara berkelanjutan. Tujuannya selain sebagai kaderisasi penggerak program pemberdayaan juga untuk peningkatan pengetahuan memetakan masalah dan keterampilan lainnya.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan pemerintah dan inisiatif masyarakat memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Program pemberdayaan pemerintah memiliki kekuatan seperti dukungan kebijakan, regulasi, anggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, kelemahannya meliputi birokratisasi yang lambat, menggunakan pendekatan *top-down*, dan kurangnya fleksibilitas serta inovasi. Selain itu, alokasi anggaran sering lebih fokus pada pembiayaan program daripada menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, program pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat lebih adaptif, fleksibel, dan melibatkan warga secara langsung dalam semua tahap pelaksanaan. Program ini juga cenderung inovatif dan mendorong partisipasi aktif warga. Namun, tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga ahli, dan pengalaman. Jangkauan program juga sering terbatas, dan minimnya dukungan eksternal bisa menghambat keberlanjutannya.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, baik yang diinisiasi pemerintah maupun masyarakat sendiri, sangat bergantung pada beberapa faktor, namun partisipasi masyarakat menjadi

perhatian utama. Partisipasi masyarakat di dalam program memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk lebih berdaya dibandingkan sebelumnya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berkontribusi terhadap penyelenggaraan program untuk lebih efektif dan berkelanjutan. Basis penelitian studi literatur menjadi keterbatasan penelitian ini, meskipun telah mempelajari secara mendalam berbagai sumber relevan seperti hasil penelitian terdahulu dan buku referensi namun informasi faktual lapangan dan interaksi dengan pelaksana dan penerima program (*beneficiaries*) menjadi terbatas. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, diharapkan penelitian kedepan agar melanjutkan penelitian ini dengan basis informasi faktual lapangan dengan mengangkat dan menelusuri satu program masing-masingnya dari program pemerintah dan program inisiatif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I., R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi, I., R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan) Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Almasri & Deswimar D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *El-Riyasah Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi*, 5(1), 41-52.
doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Asaf, A. S. (2019). Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(2), 26-31. doi:
<https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.126>
- Cresswell, J.W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: Sage.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Faraji, M., Seifdar, M., H., Amiri, B. (2024). Sharing economy for sustainability: A review. *Journal of Cleaner Production*, 434, 1-17. doi:
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140065>

- Gunawan, G., H. (2021). Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 113-127. doi: <http://dx.doi.org/10.52423/jkps.v2i2.18650>
- Guo, J., Hao., Y. & Ling W. (2024). The effects of social class on social welfare attitudes A mediating role of fairness perceptions Evidence from two welfare states and China. *International Review of Economics & Finance*, 89,1529-1538. doi: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.09.009>.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Long, X., Ji., X. (2019). Economic Growth Quality, Environmental Sustainability, and Social Welfare in China- Provincial Assessment Based on Genuine Progress Indicator. *Ecological Economics*, 159, 157-176. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.01.002>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mirani, N. (2019). *Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Studi Kasus di Desa Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Tahun 2016-2017*. Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17-33. doi: <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington DC: The World Bank.
- Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory*. London: Macmillan Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rasyid, F. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial, Teori dan Praktik*. Kediri: STAIN Kediri Press
- Reskiaddin, L., O. et al (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan: Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Jambi*, 4(2), 43-49. doi: <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10569>
- Santoso, A., A., P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 7(2), 33-48. doi: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2930>
- Stewart, A., M. (1998). *Empowering People*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudarsana, I., K. (2018). Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Pendidikan Agama Hindu Bagi Anak Panti Asuhan. *Journal of Character Education Society*, 1(1), 41-51. doi: <https://doi.org/10.31764/jces.v1i1.75>
- Tamba, W. P. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Lingkungan Permukiman Kampung Deret RW 02 Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. *Unpublished Thesis Magister*. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia, Depok.
- Wardana, K., A., A. (2017). Tindakan Sosial Komunitas Save Street Child Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Malang. *Jurnal Komunitas Universitas Airlangga*, 6(3), 1-17. <https://journal.unair.ac.id/>
- Wimartha, et al. (2023). Implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Terkait Eksploitasi: Peran Save The Children Terhadap Kasus Pekerja Anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 83-95. doi: <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04>

- Wirantari, I. D. A. P. (2024). Komparasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Ekologis Studi Kasus: Desa Tenganan Dan Desa Suana. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 24-30. doi: <https://doi.org/10.33005/jdg.v14i3.4852>
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.